

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian di jemaat Ebenhaezer Pa'tondokan menunjukkan bahwa praktik politik transaksional di Jemaat ini berlangsung karena sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang ada ditengah-tengah jemaat. Dalam perspektif teori kekuasaan Max Weber, kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan secara langsung, tetapi karena adanya legitimasi kekuasaan yang diakui oleh mereka yang dikuasai.

Dalam konteks jemaat ini, legitimasi kekuasaan yang dominan terjadi adalah legitimasi kekuasaan tradisional dan karismatik, dimana oknum yang menyampaikan pesan politik diterima karena status sosialnya yang telah lama dihormati dan karisma personalnya yang membuatnya dipercaya. Kekuasaan tersebut kemudian digunakan untuk mempengaruhi pilihan politik jemaat. Kondisi ini menyebabkan sikap anggota jemaat sebagian memilih diam atau menerima praktik politik transaksional demi menjaga relasi sosial dan menghindari konflik meskipun secara moral mereka menyadari adanya persoalan dalam praktik tersebut.

Dari perspektif teologi Kristen, fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius terhadap panggilan gereja sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas, keadilan, dan kebenaran. Ketika gereja tidak bersikap

kritis terhadap praktik politik transaksional, maka fungsi profetis gereja sebagai suara kenabian akan terus tercedera. Akibatnya, gereja sebagai garam dan terang dunia dapat ternodai, karena pelayanan yang seharusnya berlandaskan kasih dan ketulusan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis.

Oleh karena itu, kepemimpinan Kristen memiliki peran yang sangat penting dalam merespons fenomena ini. Pemimpin gereja dipanggil untuk menegakkan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan, integritas, dan keberanian. Dengan memperkuat pemahaman teologis jemaat serta bersikap tegas terhadap praktik politik transaksional, pemimpin gereja dapat membimbing jemaat untuk tetap kritis, dan setia terhadap nilai-nilai iman Kristen. Hal ini dapat menolong gereja tidak menjadi alat legitimasi kekuasaan, melainkan tetap menjalankan panggilannya sebagai lembaga yang menghadirkan kebenaran dan keadilan di tengah kehidupan sosial dan politik.

B. Saran

1. Bagi Pemimpin Gereja

- a. Pemimpin gereja perlu membangun sikap yang lebih tegas dalam menyikapi bantuan dari pihak politik yang datang kegereja, terlebih ketika dalam masa-masa pemilu. Hal ini penting agar gereja tidak menjadi sarana legitimasi kekuasaan politik tertentu.

- b. Pemimpin gereja diharapkan lebih aktif memberikan pembinaan kepada jemaat mengenai relasi antara iman, kekuasaan, dan politik, sehingga jemaat memiliki pemahaman yang kritis terhadap praktik politik transaksional di lingkungan gereja.

2. Bagi Jemaat

- a. Jemaat diharapkan memiliki sikap yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menanggapi pesan maupun bantuan politik yang masuk ke dalam gereja, dengan mempertimbangkan dampak moral dan sosialnya bagi kehidupan bersama.

3. Bagi Pemimpin Politik, Pemerintah, dan Calon Legislatif

- a. Pemimpin politik dan calon legislatif diharapkan menghormati otonomi dan independensi gereja sebagai lembaga keagamaan, dengan tidak memanfaatkan ruang dan otoritas gereja untuk kepentingan politik praktis.
- b. Bantuan kepada gereja sebaiknya diberikan setelah proses pemilu selesai dan tidak disertai dengan tuntutan atau pesan politik terselubung, sehingga tidak menciptakan relasi kuasa yang menekan atau menciderai nilai pelayanan.
- c. Pemimpin politik perlu mengedepankan etika politik yang berorientasi pada pelayanan publik, kejujuran, kepatuhan pada undang-undang dan tanggung jawab moral, agar relasi antara gereja dan negara terbangun secara sehat dan saling menghormati.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik politik transaksional dalam gereja dengan cakupan jemaat yang lebih luas, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi kuasa antara gereja dan aktor politik.
- b. Perlu dilakukan penelitian komparatif antara gereja yang mengalami praktik politik transaksional dan gereja yang menjaga jarak dari kepentingan politik, untuk melihat dampak sosial dan teologis yang muncul.

Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan gereja dapat lebih bijaksana dalam menyikapi politik transaksional dan tetap menjalankan fungsinya sebagai institusi moral yang menjaga nilai-nilai Kristiani di tengah dinamika politik yang terus berkembang